

## **DAMPAK PEMBERLAKUAN STANDAR MAINAN ANAK SECARA WAJIB TERHADAP INDUSTRI DAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

### ***Impact of Mandatory Toys Standards Implementation for Industry and Conformity Assessment Bodies***

**Endi Hari Purwanto dan Utari Ayuningtyas**

Pusat Penelitian dan Pengembangan - Badan Standardisasi Nasional  
Gedung I BPPT Lantai 9 – 14, Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta, 10340, Indonesia  
E-mail: endi@bsn.go.id

Diterima: 3 Mei 2016, Direvisi: 6 Oktober 2016, Disetujui: 11 Oktober 2016

#### **Abstrak**

Pemberlakuan SNI wajib mainan anak memperlihatkan dampak yang beragam bagi Industri, Lembaga sertifikasi produk (LPro) dan Laboratorium pengujian (LP). Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak dari pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib terhadap industri, LSPro dan LP. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui survei responden dengan menyebarkan kuesioner kepada: Industri, LSPro dan LP untuk mendapatkan persepsi responden terhadap yaitu: jumlah investasi, ekspansi pasar, volume penjualan, harga jual, jumlah pemasok, harga bahan baku, biaya produksi, volume ekspor, pangsa pasar, dan jumlah pengaduan produk cacat. Metode sampling yang digunakan *purposive sampling*, dengan mengambil sampel 46 responden, yang terdiri dari 32 industri (populasi=184), 9 LSPro (populasi=11) dan 5 laboratorium uji (populasi =15), di 8 kota survei di Indonesia. Diasumsikan bahwa penerapan SNI secara wajib diberlakukan dengan: skema sertifikasi, SNI, dan sistem sertifikasi yang mengikat sama (non-diskriminatif). Hasilnya menunjukkan bahwa pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib berdampak pada peningkatan harga jual produk yang dipicu oleh adanya peningkatan biaya sertifikasi mainan anak. Namun terhadap investasi, ekspansi pasar, jumlah pemasok, harga bahan baku, volume ekspor, penjualan dan pangsa pasar cenderung konstan. Di sisi LPK pemberlakuan SNI wajib mainan anak berdampak pada peningkatan biaya sertifikasi, peningkatan perbedaan hasil uji, ketidakjelasan kategori mainan anak, peningkatan investasi alat, peningkatan parameter tidak memenuhi hasil dan biaya sampling mainan. Secara umum kebijakan ini berdampak terhadap laboratorium pengujian berupa peningkatan permintaan sertifikasi atau pengujian, peningkatan waktu pengujian, penambahan investasi alat, biaya material referensi uji dan peningkatan biaya operasional alat uji.

**Kata kunci:** SNI mainan anak, SNI wajib, Industri, LSPro, Laboratorium uji.

#### **Abstracts**

*SNI compulsory toys show the effects of varying industry, product certification body and testing laboratory. The aim is analyzing the impact of implementation of mandatory SNI toys to industry, product certification body and testing laboratory. The method used is a qualitative approach through the survey respondents by distributing questionnaires to Industry, LSPro and testing laboratory to gain the respondent's perceptions are: the amount of investment, market expansion, sales volume, sales price, the number of suppliers, raw material prices, costs of production, export volume, market share, and the number of complaints of defective products. Sampling method used purposive sampling, by taking a sample of 46 respondents, which consists of 32 industries (population = 184), 9 LSPro (population = 11) and 5 testing laboratory (population = 15), with 8 major cities in Indonesia. It is assumed that the application of SNI shall be effected by the certification scheme, SNI, and the same certification system throughout Indonesia. The results showed that SNI mandatory toy significant impact on the increase in selling prices triggered by an increase in the cost of certification of children's toys. However on investment, market expansion, the number of suppliers, raw material prices, the volume of exports, sales and market share is relatively constant. Beside LPK SNI compulsory toys have increased the costs of certification (83.3%), increased differences in test results (66.7%), unclear categories of toys (50%), increased investment in equipment (66.7%), increase does not meet the parameters of the sampling results and cost toys (60%). In general, these policies affect the testing laboratory of increased demand for certification or testing (67%), the increase in test time (77%), additional investment in equipment (88%), the cost of materials reference test (67%) and an increase in operational cost test equipment.*

**Keywords:** SNI toys, mandatory of SNI, Industry, LSPro, laboratory test.

## 1. PENDAHULUAN

Kementerian Perindustrian telah memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Nomor 55/M-IND/PER/11/2013. Terdapat 5 SNI, 1 EN dan 2 standar ISO yang harus diterapkan bagi Industri dan LPK. Didalam peraturan tersebut pula, mainan dikelompokkan dalam 12 jenis yang mengacu pada kode *Harmonized System* (HS Code), setiap jenis mainan terdiri beberapa variasi, dan tidak tertutup kemungkinan terdapat mainan yang tidak masuk dalam peraturan tersebut.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menerbitkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 301 Tahun 2011. Di dalam PSN tersebut disebutkan bahwa ketentuan dalam regulasi teknis merupakan intervensi pasar yang berdampak pada kegiatan usaha seperti menghambat persaingan sehat, menghambat inovasi, menghambat perkembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), sehingga analisis kesiapan harus dilakukan, antara lain terkait kesiapan pelaku usaha dan kesiapan lembaga penilaian kesesuaian. Analisis kesiapan tentang hal ini telah ada seperti yang dilakukan oleh Eddy dan Dwinna (2010).

PSN 301 memandu dan mengarahkan pemberlakuan secara wajib SNI mainan anak dapat memberikan dampak positif bagi pasar sehingga diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana dampak yang dialami oleh industri dan LPK sebagai evaluasi pelaksanaan wajib SNI produk mainan anak di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan fakta dampak yang dirasakan *stakeholder* dapat sinergis dengan tujuan regulasi tersebut dan bermanfaat memperbaiki dan mengembangkan sistem standardisasi khususnya penerapan SNI mainan anak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak yang muncul pasca diterapkannya SNI wajib mainan anak, yakni: 1) dampak penerapan SNI wajib terhadap industri. 2. dampak penerapan SNI wajib terhadap LPK (LSPro dan Laboratorium Uji).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301 Tahun 2011

PSN 301 ini merupakan pedoman bagi instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang

terkait dengan Perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT), mencakup persiapan dan kajian pemberlakuan SNI secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan Perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT), mencakup persiapan dan kajian pemberlakuan SNI secara wajib, program nasional regulasi teknis, penetapan, implementasi, pengawasan (Liepina,2014), evaluasi dan kaji ulang regulasi teknis (PSN 301, 2011).

Pemberlakuan suatu regulasi teknis secara wajib merupakan intervensi pasar yang berdampak pada kegiatan usaha. Oleh karena itu perencanaan suatu regulasi teknis harus dilakukan secara berhati-hati karena apabila ketentuan regulasi tersebut berisi persyaratan-persyaratan yang kurang baik maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan iklim usaha dan persaingan yang sehat, menghambat perkembangan dunia usaha, dan menimbulkan pelanggaran terhadap perjanjian regional dan internasional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh Pemerintah (PSN 301, 2011)

### 2.2 Definisi mainan anak dan jenis-jenisnya

Beberapa ahli memberikan definisi dari istilah mainan anak. Agar mendapatkan perspektif yang lengkap mengenai mainan anak maka berikut ini disajikan beberapa makna mainan anak sebagai berikut:

1. Mainan anak adalah setiap produk atau bahan yang dirancang atau didesain secara jelas dimaksudkan untuk digunakan untuk bermain oleh anak-anak di bawah umur 14 tahun untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak (SNI ISO 8124-1:2010).
2. Mainan anak adalah alat untuk bermain; barang yang dipermainkan atau sesuatu yang berfungsi sebagai mainan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Adapun definisi anak secara Psikologi:

- a) Anak adalah keturunan alami seseorang atau orang 14 tahun dan di bawah 14 tahun atau "anak" harus dibedakan dari "kecil" yang siapapun di bawah 18 di hampir semua negara.(Hurlock, 1953),
- b) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No.23, 2002)

Jadi mainan anak adalah sesuatu yang digunakan dalam permainan oleh anak-anak, orang dewasa ataupun binatang yang umumnya

di bawah umur 14 tahun. Berbagai jenis benda dihasilkan untuk digunakan sebagai mainan, akan tetapi barang yang diproduksi untuk tujuan lain dapat pula digunakan sebagai mainan.

Sebagai contoh, seorang anak dapat mengambil suatu alat rumah tangga dan 'menerbangkannya' keliling rumah, membayangkan bahwa benda tersebut adalah sebuah pesawat terbang. Jenis barang lain yang dipasarkan sebagai mainan, ditunjukkan terutama sebagai barang-barang koleksi dan barang-barang dari jenis ini tidak umum untuk dimainkan. SNI dan standar mainan anak. Peraturan Menteri Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 24/M-IND/PER/4/2013 dan Nomor. 55/M-IND/PER/11/201, dikeluarkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan khususnya pada bayi dan anak, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. SNI yang diberlakukan wajib dalam Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut: 1) SNI ISO 8124-1:2010 - Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis, 2) SNI ISO 8124-2:2010 - Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar, 3) SNI ISO 8124-3:2010 - Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (Kratke,2015), 4) SNI ISO 8124-4:2010 - Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal, 5) SNI IEC 62115:2011 – Mainan elektrik-keamanan dan sebagian parameter, 6) SNI 7617:2010 – Non Azo dan Formaldehida dan 7) EN 71-5 – Mainan Kimia (set) selain set eksperimental.

### 2.3 Penelitian terkait

Analisis kesiapan tentang kesiapan pemberlakuan SNI mainan secara wajib telah ada seperti yang dilakukan oleh Eddy dan Dwinna (2010) dengan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis tersebut adalah sebagian besar produsen tidak kesulitan menerapkan SNI Mainan Anak kecuali pada industri skala kecil dan menengah, dan sebagian besar produsen serta asosiasi menghendaki segera diberlakukannya penerapan standar mainan anak secara wajib. Sedangkan hasil analisis terkait LPK, dinyatakan laboratorium pengujian dianggap siap walau keberadaan masih terpusat di Jabodetabek namun tidak ditemukan satupun lembaga sertifikasi.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Data dan Parameter

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari 2 jenis data yaitu: 1) data persepsi industri mengenai pengaruh standar terhadap parameter yang diteliti dan 2) data persepsi laboratorium uji dan LSPro mengenai pengaruh standar terhadap parameter yang diteliti. Parameter yang diteliti akan dijelaskan kemudian.

### 3.2 Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada industri dan LPK dengan sebaran lokasi responden meliputi 8 kota besar di Indonesia. Pengambilan sampel di 8 kota tersebut didasarkan pada kondisi yaitu apabila suatu produk telah diberlakukan secara wajib oleh Pemerintah maka berlaku sama pula terhadap industri dan LPK yang menerapkannya baik secara aturan maupun dampak yang diterimanya. Dengan demikian jumlah kota tidak signifikan mempengaruhi hasil penelitian yang akan didapat. Adapun yang cukup berpengaruh terhadap variasi dampak yang dirasakan adalah terletak pada perbedaan skala industri, sehingga pengambilan 8 sampel kota memenuhi keterwakilan setiap karakteristik responden yang ada.

Adapun sejumlah data sekunder diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui studi literatur melalui media buku, media massa, internet dan jurnal penelitian.

### 3.3 Metode analisis data

Untuk mendapatkan tujuan penelitian maka digunakan metode kualitatif dengan analisis proporsi statistik (persentase) yaitu persen perbandingan antara jumlah responden yang menyatakan naik, tetap atau turun dari parameter dampak yang ditanyakan dalam kuesioner untuk industri, LSPro maupun laboratorium uji terhadap jumlah responden. Kemudian hasilnya dijelaskan secara deskriptif dengan statistik persentase.

Data yang diperoleh dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan metode proporsi statistik untuk melihat berapa besar persepsi responden yang berpendapat bahwa standar memberikan pengaruh peningkatan, tetap/stagnan atau penurunan terhadap parameter yang ditanyakan. Satuan proporsi adalah persen (%) dengan mengikuti persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2012):

- % meningkat = 
$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "meningkat"}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$
 adalah untuk dampak yang “meningkat”
- % menurun = 
$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "menurun"}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$
 adalah untuk dampak yang “menurun”
- % tetap = 
$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "tetap"}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$
 adalah untuk dampak yang “tetap”

Dengan kriteria dampak sebagai berikut:

- Diambil persentase (%) yang terbesar dari setiap parameter sebagai dampak “peningkatan “ terhadap parameter yang dirasakan.
- Diambil persentase (%) yang terbesar dari setiap parameter sebagai dampak “penurunan “ terhadap parameter yang dirasakan.
- Diambil persentase (%) yang terbesar dari setiap parameter sebagai dampak “tetap” terhadap parameter yang dirasakan.

Parameter yang diukur dalam penelitian ini terdiri dari 11 parameter untuk dampak terhadap industri yaitu: jumlah investasi, ekspansi pasar, harga jual, jumlah pemasok, harga bahan baku, biaya produksi, nilai ekspor, volume penjualan, pangsa pasar, jumlah pengaduan dan biaya membengkak sedangkan 8 parameter yang digunakan untuk mengukur dampak terhadap LPK yaitu: jumlah permintaan sertifikasi/pengujian, lama waktu sertifikasi/pengujian, biaya sertifikasi/pengujian, perbedaan hasil uji, kategori/pengelompokkan mainan anak, jumlah investasi alat, jumlah parameter uji gagal, dan jumlah pengaduan.

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu slovin, untuk 11 parameter pertama sebanyak 32 sampel responden industri (N=184 industri, slovin dengan Interval Confidence (IC) 90%) di 8 kota besar di Indonesia yang terdiri dari: Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bogor, Medan, Bandung, Jakarta/Tangerang dan Bali. Hasilnya diperoleh komposisi industri yaitu 18 industri merupakan skala menengah (56,3%), 8 industri berskala kecil (25%), 5 industri berskala mikro (15,6%) dan 1 industri berskala usaha besar (3,1%). Responden diberikan 3 pilihan jawaban atas pertanyaan parameter yang diajukan yaitu: naik, tetap dan turun. Sedangkan untuk 8 parameter kedua sebanyak 9 sampel responden LSPro (N=11 LSPro) dan 5 sampel responden

laboratorium uji terkait mainan anak. Digunakan metode slovin dengan IC 90% di kota dimana LPK berada.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Dampak terhadap Industri

Dengan populasi industri mainan anak sebesar 184 industri mainan anak diambil sampel sebanyak 32 responden industri digunakan sebagai sampel data primer dalam penelitian ini, dengan mengambil 8 kota di Indonesia sebagai wilayah pengambilan sampel industri.

Berdasarkan survei diketahui sebaran responden cenderung lebih mendominasi daerah Surabaya (18,8%), Bogor (15,6%), Jakarta-Tangerang (15,6%) dan Bali (15,6%), yang mana di kota tersebut banyak ditemukan sentra-sentra industri mainan anak yang telah menerapkan SNI.

Secara umum, responden yang diambil sebagai sampel adalah produsen mainan anak. Produsen mainan anak adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang memproduksi mainan dan memasarkan mainan dimaksud dengan menggunakan atau tanpa menggunakan mereknya (Permenperind No.24, 2013). Dalam penelitian ini sebaran responden industri yang digunakan sebagai sampel studi didominasi oleh industri menengah (56,3%) dan industri kecil (25,0%). Fakta populasi menunjukkan bahwa jumlah industri kecil-menengah lebih besar daripada jumlah industri mainan anak skala menengah-besar yaitu 53,8% : 46,2%. Ini memberikan makna bahwa industri kecil mainan anak cukup meluas di kalangan masyarakat sebagai usaha mikro-kecil yang tumbuh dan berkembang namun sejumlah industri mikro-kecil tersebut lokasinya sulit untuk dicapai saat survei mengingat jauhnya tempat mereka dari pusat kota.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini lebih cenderung didominasi oleh industri manufaktur mainan anak (87,5%) daripada industri perakitan mainan anak (12,5%) dan dari segi kepemilikan merek produk, sebagian besar mempunyai merek sendiri (81,3%) daripada merek lisensi (15,6%). Artinya industri mainan anak di Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar yaitu ketersediaan bahan baku, material pendukung dan pasar yang cukup menjanjikan sehingga investasi di bidang manufaktur mainan anak masih terbuka luas. Dan produsen mainan anak memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kualitas produk yang dihasilkannya yang dibuktikan dengan kepemilikan merek sendiri yang lebih

dominan. Sekitar 96,9% responden (31 industri) memiliki sertifikat merek (Tanda Daftar Merek). Pemberlakuan regulasi mainan anak secara wajib di Indonesia, ada indikasi tidak memberikan dorongan investasi yang signifikan. Hasil cuplikan data lapangan memperlihatkan hanya 43,8% industri menyatakan bahwa tidak ada peningkatan investasi yang terjadi setelah pemberlakuan SNI wajib mainan anak. Namun ada sekitar 34,4% industri yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan investasi pasca pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib tidak memberikan dampak terhadap peningkatan modal belum sepenuhnya benar.

Ada sejumlah industri mainan anak khususnya industri mikro dan kecil cenderung mengalami peningkatan kapital atau modal pasca diberlakukannya SNI mainan anak secara wajib. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya

biaya operasional perusahaan akibat proses sertifikasi yang dikenakan. Biaya operasional ini menambah jumlah perputaran modal yang harus disediakan oleh industri mikro-kecil. Dan umumnya ini sangat signifikan terasa dialami industri mikro dan kecil yang memiliki jumlah perputaran modal yang lebih kecil ketimbang industri menengah. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan ini berakibat pada peningkatan perputaran modal pada industri mikro-kecil dan cenderung tidak merubah investasi pada industri menengah (konstan). Sebagaimana diinformasikan dalam media online bahwa hingga 2015 ini terdapat 2 investasi baru industri mainan anak dari Korea Selatan yaitu PT.Leosco dan PT.Sung Won. PT Leosco akan menginvestasikan pembangunan pabrik di Subang, Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai 1 juta US\$, sedangkan PT. Sung Won ([www.samsungtugu.com](http://www.samsungtugu.com), 2008).

**Tabel 3** Dampak penerapan SNI wajib mainan anak terhadap industri.

No	Kondisi Umum	Dampak
1	Investasi (modal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 11 (34,4%)</li> <li>▪ Tetap : 14 (43,8%)</li> <li>▪ Turun : 1 (3,1%)</li> </ul>
2	Ekspansi pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 7 (21,9%)</li> <li>▪ Tetap : 18 (56,3%)</li> <li>▪ Turun : 2 (6,3%)</li> </ul>
3	Harga jual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 14 (43,8%)</li> <li>▪ Tetap : 13 (40,6%)</li> <li>▪ Turun : 0 (0,0%)</li> </ul>
4	Jumlah pemasok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 3 (9,4%)</li> <li>▪ Tetap : 20 (62,5%)</li> <li>▪ Turun : 2 (6,3%)</li> </ul>
5	Harga bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 13 (40,6%)</li> <li>▪ Tetap : 17 (53,1%)</li> <li>▪ Turun : 0 (0,0%)</li> </ul>
6	Biaya produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 18 (56,3%)</li> <li>▪ Tetap : 11 (34,4%)</li> <li>▪ Turun : 0 (0,0%)</li> </ul>
7	Vol.Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 2 (6,3%)</li> <li>▪ Tetap : 7 (21,9%)</li> <li>▪ Turun : 0 (0,0%)</li> </ul>
8	Vol.Penjualan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 4 (12,5%)</li> <li>▪ Tetap : 19 (59,4%)</li> <li>▪ Turun : 5 (15,6%)</li> </ul>
9	Pangsa Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naik : 5 (15,6%)</li> <li>▪ Tetap : 20 (62,5%)</li> <li>▪ Turun : 1 (3,1%)</li> </ul>
10	Variabel biaya yang membengkak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya desain produk : 8 (25,0%)</li> <li>▪ Biaya Pengujian : 25 (78,1%)</li> <li>▪ Biaya Sertifikasi : 24 (75,0%)</li> <li>▪ Biaya sampling mainan : 15 (46,9%)</li> <li>▪ Biaya bahan baku : 16 (50,0%)</li> <li>▪ Biaya stiker mainan : 1 (3,1%)</li> </ul>

Ekspansi pasar sejumlah responden mainan anak juga mengalami kondisi yang stagnan. Produsen cenderung mempertahankan pada posisi penguasaan pasar yang dimilikinya saat ini (56,3%) karena sebagian besar mereka masih melakukan penyesuaian terhadap adanya regulasi wajib Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI mainan anak. Namun pada sebagian produsen mikro-kecil dan menengah justru memperlihatkan upayanya untuk melakukan perluasan pasar (21,9%) seperti: CV.Omocha Toys (wooden toys), produknya dapat masuk ke pasar modern, CV.Jaring Citra Lestari, CV.Lima Ribu (Medan), CV.Mainan Kayu (Jakarta-Tangerang) dan PT.Sinar Harapan Plastik (Jakarta-Tangerang) mengalami peningkatan pangsa pasar 2% dan mengekspor produknya ke Philipina. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pemberlakuan kebijakan mainan anak ini lebih dominan pada stagnasi ekspansi pasar. Suatu yang rasional apabila sejumlah produsen mainan anak lebih cenderung melakukan reposisi akuntansi finansialnya dalam arti produsen bersikap mengamati perubahan indikator keuangan yang ada akibat biaya SPPT dan perubahan volume penjualan yang terjadi. Demikian pula apabila sebagian produsen masih dapat melakukan ekspansi pasar.

Perubahan harga jual sebagai akibat pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait mainan anak ini tidak mencapai 50%-nya mengalami kenaikan harga jual. Terdapat 43,8% responden yang menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan dampak terhadap kenaikan harga jual. Kenaikan harga jual ini disebabkan oleh biaya modal untuk mendapatkan SPPT SNI mengalami peningkatan sehingga ikut menaikkan harga jual produk sebesar Rp.2500,- per unit (produsen mainan edukatif & puzzle), sebagian produsen lainnya menyatakan bahwa kenaikan harga jual tersebut lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku mainan yang sesuai dengan persyaratan SNI dan kenaikan biaya produksi sebesar Rp.1000,- (produsen Baby walker, tricycle dan Ride on Car). Ada juga produsen yang menaikkan harga jual namun dikarenakan persaingan usaha yang semakin jenuh maka produsen mengambil kebijakan untuk menurunkan profit sebesar 10% (produsen balon tiup dan pelampung renang). Jika di rata-rata maka kenaikan harga jual produk mainan anak antara 10 – 20%, ini disebabkan karena biaya sertifikasi-pengujian dan harga bahan baku.

Apabila ditinjau dari perubahan jumlah pemasok maka nampak bahwa produsen menyatakan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap jumlah pemasok terutama bahan baku.

(62,5%). Kesulitan mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan SNI tidak menjadikan produsen harus mengambil pemasok baru. Survei memperlihatkan bahwa terdapat 9,4% produsen mengalami perubahan jumlah pemasok. Kondisi ini disebabkan kompleksnya komponen produk mainan yang dibutuhkan sehingga menuntut pemenuhan pemasok baru yang mampu memenuhi persyaratan SNI. Diantaranya adalah terjadi pada produsen baby walker (pemasok biji plastik, pewarna kain), dan mainan edukatif seperti puzzle dari kayu (pemasok cat). Ini artinya bahwa pemberlakuan SNI wajib mainan anak tidak mampu mendorong terciptanya industri yang menyokong bahan baku industri mainan anak seperti: industri biji plastik sesuai SNI, industri lem kayu yang aman, industri cat/pewarna mainan anak yang aman (sesuai SNI). Pola rantai pasok yang terjadi cenderung masih menggunakan pemasok lama. Ada kemungkinan pemasok tersebut melakukan importasi bahan baku yang diinginkan. Walhasil, akan berpengaruh dengan harga jual produk.

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa belum banyak industri dalam negeri yang mampu menyediakan bahan baku atau komponen mainan anak sesuai SNI. Terlihat dari perubahan harga bahan baku yang cenderung konstan-naik. Sekitar 40,6% produsen yang menyatakan naik dan 53,1% menyatakan harga bahan baku mengalami konstan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak memberikan sejumlah kebijakan yang cukup efektif untuk menghambat pergerakan harga bahan baku tersebut. Sebagaimana dirasakan di lapangan, tidak adanya upaya pemerintah untuk menginformasikan sejumlah industri cat yang aman untuk mainan anak, menginformasikan sejumlah standar terkait cat yang aman dan program pemerintah yang menurunkan harga biji plastik (PVC).

Dampak lainnya yang dirasakan produsen pasca pemberlakuan penerapan SNI wajib mainan anak adalah peningkatan biaya produksi (56,3%). Karena bertambahnya biaya yang dikeluarkan produsen berupa: biaya pengujian mainan anak dan biaya sertifikasi mainan anak. Semakin banyak jenis mainan anak yang diproduksi maka akan semakin banyak variasi parameter pengujian yang dilakukan (biaya pengujian besar). Umumnya biaya yang cukup besar ini terjadi pada industri mainan anak berskala menengah hingga besar. Peningkatan biaya produksi ini juga disebabkan oleh aturan mengenai jumlah batch produksi yang harus dipersiapkan untuk sertifikasi adalah selama 6 bulan produksi. Sejumlah produsen skala mikro-kecil merasakan dampaknya yaitu menaikkan

modal yang harus diputar dan biaya operasional yang tinggi di awal tahun sertifikasi.

Namun ada sekitar 34,4% produsen menyatakan biaya produksi cenderung tidak mengalami perubahan berarti (tetap). Ini artinya bahwa biaya sertifikasi dan pengujian tidak menjadi beban karena dimungkinkan ditutupi oleh angka penjualan yang cukup tinggi atau mendapatkan bantuan (insentif) biaya sertifikasi dari Pemerintah. Sebagian besar mereka merupakan pemilik pasar yang pasti (captive market) seperti: mainan edukasi baca Quran dan mainan kayu yang mempunyai pesanan dari lembaga pendidikan mulai dari TK-SD sampai dengan SMU.

Sebagian besar produsen yang di survei adalah bukan eksportir besar, sehingga hasil survei lapangan memperlihatkan dampak yang tidak signifikan (<50%). Hanya 6,3% produsen yang menyatakan volume ekspor mengalami kenaikan dan 21,9% menyatakan konstan (tetap). Ini mengindikasikan bahwa penerapan SNI yang sesungguhnya adalah meningkatkan daya saing industri namun kenyataannya belum dapat menambah daya saing produsen eksportir. Jumlah ekspor produsen mainan nasional masih tergantung sepenuhnya pada daya beli di luar negeri. Kondisi ini dikarenakan kondisi perdagangan ekspor mainan anak sudah ideal dimana mainan anak diorder sesuai dengan spesifikasi desain yang diminta konsumen luar negeri ditambah dengan syarat mutu dan bebas bahan kimia yang sesuai aturan di negara mereka.

Dari sisi volume penjualan nampak bahwa tidak ada perubahan (konstan) (59,4%). Kondisi ini disebabkan pasar mainan anak yang sudah jenuh dan daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Secara fakta, daya beli masyarakat sesungguhnya semakin besar karena pertambahan penduduk Indonesia yang cukup besar (jumlah anak-anak), namun pasar yang besar ini, ditawarkan produk impor yang cukup bervariasi dan harga terjangkau akhirnya mengambil porsi volume penjualan produsen dalam negeri yang akhirnya mengalami volume penjualan produsen mengalami konstan-menurun. Data perdagangan ekspor-impor mainan anak memperlihatkan bahwa meskipun neraca perdagangan produk mainan anak mengalami surplus sebesar rata-rata 188,4 juta US\$ selama tahun 2013-2015 (angka perkiraan) namun ada kurang lebih 419 juta unit mainan anak impor masuk ke pasar nasional (73%) (lipsus.kontan.co.id, 2011), sedangkan volume penjualan industri lokal nasional yang diserap pasar domestik adalah sebesar 27% atau sekitar 155 juta unit mainan merupakan hasil produksi

lokal nasional. Artinya pasar lokal mainan anak telak dikuasai oleh produk impor.

Mainan impor terbesar berturut-turut berasal dari China dan Taiwan sebagian lagi dari Amerika Serikat. Mainan anak asal Cina di pasar Indonesia lebih banyak dibanjiri oleh mainan yang berkualitas rendah yang terbuat dari plastik dan karet yang tipis sehingga memungkinkan cepat rusak apabila dilempar atau terjatuh. Karena itu mainan ini sering dijumpai memiliki harga yang murah. Meskipun bersertifikasi SNI, mainan anak asal Cina tetap dapat dikenali dengan sangat mudah: biasanya menggunakan bahan plastik yang tidak berkualitas (daur ulang), hasil cetakan plastiknya tidak rapi dan memiliki harga yang cukup murah (lipsus.kontan.co.id, 2011).

Adapun mainan anak asal Amerika Serikat dan Eropa merupakan mainan yang dikategorikan sebagai mainan mahal yang berkualitas unggul seperti mainan elektronik. Mainan tersebut masuk ke Indonesia dan dijual di Pasar Swalayan (Mall). Target pasarnya adalah pelanggan berpenghasilan tinggi dan jaminan keselamatan-keamanan mainan yang diakui. Sebagai contoh, kita dapati mainan kereta api "Thomas" buatan asli USA lebih mahal daripada kereta api "Thomas" buatan Cina. Begitu juga produk mainan miniatur mobil "TOMICA", yang asli buatan Jepang lebih mahal daripada buatan Cina. Di Indonesia mainan ini tidak memiliki pangsa pasar yang tinggi karena jumlah penduduk Indonesia sebagai besar berpenghasilan menengah, sehingga untuk membeli mainan ini orang tua berpenghasilan sedikit tidak sanggup (Yuliandita, 2014).

Hasil pengolahan data BPS memperlihatkan bahwa penyebab utama merebaknya mainan anak impor di Indonesia adalah kalahnya kompetisi usaha industri mainan anak Indonesia oleh industri mainan asal Cina. Dalam tabel nampak bahwa dari 5 jenis mainan anak yang diperdagangkan meliputi: 1) mainan *tricycle*, skuter, mobil pedal dll (HS 9503.00.10.00), 2) *Electric trains toys* dll (HS 9503.00.30.00), 3) Mainan konstruksi selain plastik (HS 9503.00.50.00), 4) *Soft toys/stuffed toys* (HS 9503.00.60.00) dan 5) mainan lainnya (HS 9503.00.99.00), hanya 2 jenis mainan anak yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dengan daya saing produk sejenis terhadap negara lain.

**Tabel 2** Daya saing (ISP) beberapa jenis mainan anak 2012-2014.

No.	Kode HS	Komoditi	ISP 2012	ISP 2013	ISP 2014	Dominasi	Rata-Rata Daya Saing (ISP)
1	9503001000	Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls carriages	(0,77)	(0,76)	(0,55)	Impor	(0,70)
2	9503003000	Electric trains toys, includ tracks, signals and other accessories therefor	(1,00)	(1,00)	(1,00)	Impor	(1,00)
3	9503005000	Other construction sets & constructional toys, of materials other than plastics	0,92	0,34	0,95	<b>Ekspor</b>	<b>0,74</b>
4	9503006000	Stuffed toys representing animals or non-human creatures	0,90	0,96	0,98	<b>Ekspor</b>	<b>0,95</b>
5	9503009900	Other toys or parts	(0,53)	(0,24)	(0,08)	Impor	(0,28)

(Sumber: Data ekspor impor mainan anak diolah kembali dari BPS, 2015)

Fakta di lapangan pun memperlihatkan bahwa 2 jenis mainan tersebut yaitu produk mainan konstruksi kayu (HS 9503.00.50.00) dan produk boneka (HS 9503.00.60.00) selama 3 tahun (2012-2014) senantiasa mengalami neraca perdagangan surplus (dominasi ekspor) sedangkan 3 jenis mainan anak lainnya mengalami defisit (dominasi impor). Faktor yang menjadi penyebab paling utama banjirnya produk impor mainan anak adalah disebabkan oleh tingginya importasi jenis “mainan anak lainnya” yaitu HS 9503.00.99.00 dengan gap ekspor-impor sebesar 25,8 juta US\$ (ISP -0,28), berikutnya adalah jenis mainan anak “sepeda roda tiga (tricycles) dll” dengan HS 9503.00.10.00 dengan gap ekspor-impor sebesar 8,5 juta US\$. Dua jenis mainan anak inilah yang membanjiri seluruh pasar di Indonesia meskipun jika diselisih secara total masih mendapatkan nilai surplus perdagangan. Nilai Surplus perdagangan ini disebabkan daya saing produk “mainan konstruksi kayu” (ISP 0,74) dan “mainan stuffed toys” (ISP 0,95) dengan ISP lebih dari 0,5.

Selain adanya perbedaan kualitas dan volume penjualan, ragam mainan impor Cina pun lebih banyak daripada mainan lokal. Mainan impor asal Cina hampir menguasai seluruh jenis mainan anak yang masuk dalam kelompok HS (regulasi wajib) sedangkan mainan lokal hanya menguasai 3 kelompok HS mainan anak yang meliputi: perangkat konstruksi & mainan konstruksional (HS 9503.00.50.00), *stuffed toys* (HS 9503.00.60.00) dan *Puzzle* (HS 9503.00.70.00). Dari 3 jenis mainan tersebut pun hanya 2 jenis mainan anak yang mendominasi pasar dalam negeri yaitu: mainan *stuffed toys*

dan mainan konstruksional (kayu) serta sebagian untuk mainan puzzle yang terbuat dari kayu. Seluruh mainan tersebut merupakan produsen orientasi ekspor. Pasar dalam negeri lebih ditujukan kepada lembaga pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak. Terkait dengan variabel biaya yang membengkak, maka seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa hampir sebagian besar produsen menyatakan biaya pengujian (78,1%) dan sertifikasi produk (75,0%) merupakan variabel biaya yang paling dirasakan peningkatannya (menjadi beban).

Survei membuktikan bahwa penerapan SNI mainan anak berdampak pada peningkatan beban pengusaha terutama biaya penilaian kesesuaian yang menambah beban operasional perusahaan. Sejumlah produsen skala mikro-kecil mainan kayu merasa terbebani dengan biaya sertifikasi SNI dan diharuskan memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk keperluan ekspor karena bahan baku mainan tersebut berasal dari kayu (survei Yogyakarta). Terlebih lagi industri/produsen yang berlokasi jauh dengan LSP atau Lab. pengujian, faktor jarak menimbulkan biaya sertifikasi yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama (survei Medan). Penyediaan bahan baku biji plastik PVC dan cat/pewarna yang sesuai persyaratan SNI yang tidak memadai baik ketersediaan industri maupun kemudahan pajak impor secara tidak langsung berakibat pada meningkatnya biaya bahan baku (survei Semarang, Bali, Jakarta, Tangerang). Di sisi lain variasi produk yang dimiliki oleh produsen pun berpengaruh terhadap biaya. Semakin bervariasi jenis mainan anak yang dihasilkan maka akan semakin besar jumlah sampel yang harus

disiapkan dan parameter pengujian yang dibutuhkan semakin banyak.

#### 4.2 Dampak terhadap Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

Hasil survei menunjukkan bahwa pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib telah berimbas pada kenaikan beberapa aspek. Yang pertama adalah biaya sertifikasi, sejumlah LSPro menyatakan bahwa kondisi saat ini biaya sertifikasi cenderung meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan proses sertifikasi dan pengujian. Banyak bahan baku pengujian mengalami kenaikan harga, seperti: uji Ftalat (Chen,2013), uji kimia berbahaya (Chui, 2015), uji zat Azo dan Formaldehida. Selain itu biaya operasional laboratorium pun mengalami kenaikan seperti: Tarif Dasar Listrik, dan Biaya Gaji/Honor pegawai.

Yang kedua adalah terjadi peningkatan modal alat akibat penuhnya antrian pengujian laboratorium. Diharapkan dengan adanya investasi alat baru akan menambah kapasitas laboratorium dalam melayani klien. Yang ketiga adalah pasca kebijakan SNI wajib mainan anak

ini, cenderung terjadi peningkatan terhadap: perbedaan hasil uji, komplain ketidak jelasan kategori mainan anak, meningkatnya sejumlah parameter yang tidak memenuhi hasil (tidak lulus) dan meningkatnya jumlah pengaduan. Hal ini disebabkan oleh multitafsir pemahaman SNI 8124 oleh LSPro terkait masalah pengujian, belum adanya hasil uji profisiensi mainan anak yang dikeluarkan oleh KAN (hingga November 2015), simpang siurnya pemahaman mainan anak mana saja yang masuk persyaratan wajib SNI.

Kondisi tersebut berakibat pada meningkatnya jumlah parameter uji yang sering tidak lolos. Hal ini disebabkan sosialisasi pendalaman SNI 8124 dan standar mainan terkait lainnya kepada industri dan LSPro masih sangat kurang sehingga di lapangan terjadi penafsiran dan pemahaman masing-masing terhadap SNI maupun Juknis yang ada. Di sisi lain LSPro merasakan bahwa kompleksitas parameter uji yang harus dilakukan pengujian serta jumlah permintaan produk yang banyak untuk diuji mengakibatkan biaya sampling mengalami peningkatan secara kuantitas.

**Tabel 3** Dampak penerapan SNI wajib terhadap LSPro.

No	Indikator	Aspek Dampak
1	Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Biaya sertifikasi (83,3%)</li> <li>✓ Perbedaan Hasil Uji (66,7%)</li> <li>✓ Ketidakjelasan kategori mainan anak (50%)</li> <li>✓ Investasi alat (66,7%)</li> <li>✓ Parameter tidak memenuhi hasil (gagal uji) (100%)</li> <li>✓ Biaya sampling mainan karena kompleks (60%)</li> </ul>
2	Menurun	-
3	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Permintaan Sertifikasi (66,7%)</li> <li>✓ Lamanya sertifikasi (50%)</li> </ul>

(sumber: hasil pengolahan data tim peneliti, 2015)

#### 4.3 Dampak terhadap Lembaga Pengujian

Studi kasus yang terakhir adalah diambil cuplikan dari 9 laboratorium uji khusus mainan anak dari 4 kota meliputi: Yogyakarta (3 sampel), Surabaya (1 sampel), Bandung (1 sampel) dan Jakarta/Tangerang (3 sampel). Dengan komposisi responden Laboratorium yaitu: 66,6% milik pemerintah dan 33,3% milik swasta. Sebagian besar Laboratorium uji memiliki lingkup pengujian berupa: SNI 7617:2010 (78%), SNI 8124 bagian 1-2 (67%) dan EN 71-5 (67%). Kondisi lainnya adalah hampir sebagian besar Laboratorium Uji tersebut pernah mengalami pengulangan pengujian dikarenakan hasil uji negatif alias tidak lolos (44%) sehingga dijelaskan oleh salah satu responden Lab.Uji bahwa untuk mengatasinya maka dilakukan sistem duplo dan

hanya 11% yang disebabkan oleh kesalahan Laboratorium. Rata-rata pengulangan sampling adalah sebanyak 2 kali dan tata cara pengambilan sampling oleh PPC adalah lebih banyak dilakukan per Shipment dengan rata-rata ¼ - 1 kontainer. Sebagian besar laboratorium (78%) menggunakan kriteria sampling yaitu merek, usia, fungsi elektrik mekanik, bahan baku dan parameter uji. Kemudian dalam melakukan pengujian zat Azo, sebagian besar Laboratorium melakukan > dari 3 warna dan hanya 22% responden yang mengalami banyak temuan ketidaksesuaian dalam persyaratan SNI yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia.

Survei lapangan memperlihatkan bahwa pemberlakuan kebijakan SNI mainan anak secara wajib memberikan dampak yang kurang positif terhadap kinerja laboratorium yaitu

dengan jumlah permintaan pengujian yang baru bagi Laboratorium Penguji yaitu meningkatkan lama waktu pengujian yang dilakukan (77% responden). Sehingga tidak mengherankan apabila pada beberapa Laboratorium Pemerintah melakukan penambahan investasi alat laboratorium (88% responden). Selain itu mereka merasakan bahwa terdapat beberapa biaya yang semakin membengkak yaitu biaya operasional alat pengujian dan biaya Material Referensi Uji (67% responden).

Berbeda dengan LSPro, kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan SNI

mengalami peningkatan menimbulkan masalah mainan anak secara wajib ini tidak memberikan imbas yang cukup menggembirakan untuk aspek-aspek biaya pengujian cenderung stagnan (77% responden), keluhan perbedaan hasil uji (100% responden), hambatan ketidakjelasan kelompok mainan anak (87,5% responden). Di samping itu berbeda dengan LSPro, pada Lab.Uji ini untuk kegagalan uji dan jumlah pengaduan konsumen cenderung stagnan karena bisa jadi pelaksanaan prosedur Laboratorium yang semakin jelas mampu meminimalisir kegagalan uji.

**Tabel 4** Dampak penerapan SNI wajib terhadap Laboratorium Pengujian.

No	Indikator	Aspek Dampak
1	Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah permintaan pengujian (67%)</li> <li>✓ Lama waktu pengujian (77%)</li> <li>✓ Penambahan investasi alat (88%)</li> <li>✓ Biaya Material Referensi Uji (67%)</li> <li>✓ Biaya operasional alat pengujian (67%)</li> </ul>
2	Menurun	-
3	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perubahan biaya pengujian (77%)</li> <li>✓ Keluhan perbedaan hasil uji (100%)</li> <li>✓ Hambatan ketidakjelasan kategori mainan anak (87,5%)</li> <li>✓ Parameter yang sering tidak memenuhi hasil uji (75%)</li> <li>✓ Jumlah pengaduan (100%)</li> </ul>

**5. KESIMPULAN**

“Pemberlakuan SNI wajib berdampak bagi industri yaitu 56,3% peningkatan biaya produksi; 43,8% peningkatan harga jual produksi; 62,5% jumlah pemasok bahan baku tetap; 53,1% harga bahan baku yang konstan; 56,3% biaya produksi mainan anak meningkat; 21,9% volume ekspor mainan anak konstan; 59,4% volume penjualan tetap; 62,5% pangsa pasar tetap dan 78,1% pembengkakan terhadap biaya pengujian dan 75% pembengkakan biaya sertifikasi.

Pemberlakuan SNI wajib mainan anak berdampak terhadap Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) pada meningkatnya biaya sertifikasi (83,3% responden), meningkatnya perbedaan hasil uji (66,7% responden), meningkatnya ketidakjelasan kategori mainan anak (50% responden), meningkatnya investasi alat (66,7% responden), meningkatnya parameter tidak memenuhi hasil uji (gagal uji) (100% responden) dan biaya sampling mainan karena kompleks (60% responden). Adapun terdapat variabel yang mempunyai dampak konstan

(tetap) yaitu pada jumlah permintaan sertifikasi (66,7% responden) dan lamanya sertifikasi (50% responden).

Pemberlakuan SNI wajib mainan anak berdampak terhadap Laboratorium Uji berdampak paling dominan adalah pada peningkatan permintaan pengujian (67% responden), peningkatan waktu pengujian (77% responden), penambahan investasi alat (88% responden), biaya material referensi (67% responden), biaya operasional alat pengujian (67% responden).

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang telah mengalokasikan anggaran untuk penelitian ini serta Bapak/Ibu Salasta, Gembong, Azriadi, Hary Tio, Eko Wibowo Utomo atas ilmu dan waktu yang diberikan selama proses penulisan artikel ini. Juga tidak lupa penulis ucapkan terima

kasih kepada Hastomo Arbi, Rista Dianameci, Sumanto, Konny S, Quri, Armyta dan tim BSN atas waktu dan kesediaannya memberikan koreksi, saran dan masukan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional, (2011): Pedoman Standardisasi Nasional 301 (PSN 301), Jakarta Pusat
- Badan Standardisasi Nasional, (2015): SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik – Keamanan, Jakarta Pusat.
- Badan Standardisasi Nasional, (2015): SNI 7334.1:2009, Non Azo untuk bahan kain, Jakarta Pusat.
- Badan Standardisasi Nasional, (2015): SNI ISO 14184, Formaldehida untuk bahan selain kain, Jakarta Pusat.
- Badan Standardisasi Nasional, (2015): EN 71-5, Part 5: Chemical Toys (sets) other than experimental sets, Jakarta Pusat.
- Chen, Bin, (2013): *An easy and sensitive analytical method of determination of phthalate esters in children's toys by UPLCMS/MS*.
- Cui, Xin-Yi, (2015): *Toxic metals in children's toys and jewelry: Coupling bioaccessibility with risk assessment*, Environmental Pollution 200, page. 77-84.
- Direktorat Bea dan Cukai, (2012): Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Herjanto dan Dwinna, (2010): Kajian Kesiapan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Mainan Anak-Anak, Jurnal Riset Industri, Vol.4 No.1, Kementerian Perindustrian, Jakarta Pusat.
- Hurlock, Elizabeth B. (1953): *Developmental Psychology*, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (2013): Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Permen Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan secara Wajib, Jakarta Pusat.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (2013): Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib, Jakarta Pusat.
- Kratke, Renate, (2015): *Does the EU migration level of chromium VI in toys need to be lowered?*, Regulatory Toxicology and Pharmacology 73 page. 687-688.
- Liepina, Raimonda, (2014): *Market Surveillance of toys: situation assessment and improvement*, Procedia – Social and Behavioral Sciences 156 page. 360-364.
- PSN 301 (2011): *Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfa Beta.
- Undang-Undang (2014): *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, dalam Undang-Undang No.14 Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang (2002): *Undang-Undang Perlindungan Anak No.23*, Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Yuliandita, Alpina, (2014): Motivasi Indonesia Menerapkan Regulasi SNI Terhadap Mainan Impor, Studi Kasus: Produk Mainan Impor Dari Cina, Jurnal Mahasiswa FISIP, Volume 1 No.2 Oktober 2014, Universitas Riau, Indonesia.
- <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com>, (2015): Definisi anak, diakses Oktober 2015
- [www.lipsus.kontan.co.id](http://www.lipsus.kontan.co.id), (2011): mainan anak asal Cina tetap dapat dikenali dengan sangat mudah: biasanya menggunakan bahan plastik, diakses Oktober 2015.
- [www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com), (2015): Definisi mainan anak, diakses Oktober 2015.
- [www.oxforddictionaries.com](http://www.oxforddictionaries.com), (2015): Definisi mainan anak, diakses Oktober 2015.
- [www.samsungtugu.com](http://www.samsungtugu.com), (2008): Dua perusahaan mainan Korsel realisasikan investasi di Indonesia, diakses Oktober 2015.

